

PANCASILA DI MATA PARA PENELITI ASING

Riri Khariroh

*Komisioner Komnas Perempuan
dan Ketua LKP3A PP Fatayat NU*



Kajian tentang Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia telah banyak dilakukan oleh akademisi dan peneliti (dalam dan luar negeri) baik pada masa awal kelahiran Pancasila yang ditandai oleh pidato Presiden Soekarno 1 Juni 1945, masa Orde Baru maupun di era Reformasi. Daya tarik Pancasila sebagai sebuah ideologi negara salah satunya terletak pada sejarah lahirnya Pancasila, di mana para *founding fathers* berdebat dan bersepakat untuk merumuskan lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, mufakat atau demokrasi dan keadilan sosial. Pemaknaan nilai-nilai Pancasila selalu relevan dengan perkembangan sosial-politik bangsa, namun di sisi yang lain, Pancasila kerap kali menjadi alat politik kekuasaan dan alat kontrol

untuk melegitimasi berbagai kebijakan pemerintah di setiap rezim negeri ini.

Yudi Latif dalam bukunya *Negara Paripurna* menyebut Pancasila sebagai warisan jenius Nusantara. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan *ligature* (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa untuk mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan

aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.¹

Artikel ini akan membahas beberapa tulisan para peneliti asing atau biasa disebut dengan *Indonesianists* tentang Pancasila, bagaimana pandangan mereka, dan relevansinya dengan diskursus tentang ideologi negara. Tulisan-tulisan tersebut adalah 1) *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government* (Michael Morfit, 1981); 2) *The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia* (Shigeo Nishimura, 1995); 3) *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (Douglas E. Ramage, Routledge, 1995); dan 4) *Soeharto's Javanese Pancasila* (Ken Ward) dalam Monograf "*Soeharto's New Order and its legacy*" (ANU E Press, 2010). Tulisan-tulisan tersebut sengaja dipilih sebagai representasi pandangan yang beragam dari para peneliti asing tentang Pancasila.

Pancasila di Era Soekarno

Salah satu argumen yang paling fundamental yang dikemukakan oleh Soekarno adalah bahwa bangsa Indonesia yang baru merdeka ini harus didasarkan pada "percaya kepada Tuhan" di mana maknanya adalah bukan negara Islam atau negara sekuler tetapi sebuah bangsa

yang religius. Semua agama, termasuk Islam bebas untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Ini merupakan hasil kompromi dengan golongan Islam yang menuntut penambahan "tujuh kata" atau yang biasa dikenal dengan Piagam Jakarta, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya," namun akhirnya dicoret demi menjaga persatuan bangsa.

Sejak pengucapan Pancasila sebagai dasar ideologis formal Republik Indonesia di tahun 1945, hal ini telah menjadi bagian tak terbantahkan dari debat politik dan ideologis. Pidato "Lahirnya Pancasila" oleh Soekarno yang sekarang hampir sakral yaitu 1 Juni 1945, adalah untuk menciptakan landasan bersama bagi pembentukan sebuah negara independen, bersatu, negara modern yang berkarakter dengan bekas jajahan Hindia Belanda. Soekarno menggambarkan sebuah negara yang dia harapkan akan menarik perhatian semua orang Indonesia, terlepas dari apa pun agama mereka, etnisitas atau asal daerah. Proposal untuk menyatakan Islam sebagai dasar dari Republik Indonesia yang baru dilihat sebagai upaya memecah-belah oleh para pemimpin nasionalis sekuler saat itu. Oleh karena itu, Pancasila dirancang sebagai pernyataan nilai-nilai universal, cemerlang ditulis oleh Soekarno, di mana semua orang Indonesia bisa setuju.²

1 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta, 2011), hlm. 41-42

2 Douglas Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London, Routledge, 1995)

Pancasila meyakinkan sekuler nasionalis, baik Muslim dan non-Muslim, bahwa bangsa yang baru ini tidak akan memprioritaskan Islam atas agama-agama lain. Sebaliknya, Pancasila menetapkan bahwa sementara Indonesia secara filosofis berdasarkan agama, namun negara tidak mendukung iman tertentu. Ini politik kompromi yang menyiratkan bahwa pemerintah akan menghormati keragaman agama warganya.

Selanjutnya di era Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) ditandai oleh gerakan separatis di berbagai daerah dan perjuangan bersenjata yang diilhami oleh Islam terhadap pemerintah pusat, atau yang bisa dikenal *Darul Islam* (DI/TII). Kelanjutan ancaman bersenjata terhadap persatuan bangsa disorot oleh banyak orang, terutama di lingkungan angkatan bersenjata. Kelahiran kelompok separatis DI/TII adalah politik mahal yang merupakan implikasi dari perselisihan ideologis tentang dasar negara. Ini juga waktunya ketika angkatan bersenjata membentuk ukuran persatuan atas diri mereka sendiri, berhasil menghancurkan pemberontakan daerah, dan muncul sebagai yang terdepan, paling disiplin, dan sebagai sebuah lembaga nasional terorganisir yang baik selain Partai Komunis Indonesia (PKI). Posisi Islam juga semakin genting karena Soekarno melarang Partai Islam, *Masyumi*, karena dugaan keterlibatan dalam pemberontakan Islam di daerah.

Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Soekarno juga berusaha mem-

batasi kekuatan semua orang dan partai-partai politik. Pada pertengahan 1950-an Soekarno menyarankan agar negara tersebut menolak partai politik karena mereka bertentangan dengan konsep *musyawarah* dan *mufakat*, yang terkandung dalam Pancasila. Dalam upaya menyeimbangkan semua kekuatan yang saling berkontestasi antara ideologi Islam, nasionalisme, dan komunisme, Soekarno menganjurkan bukan hanya Pancasila, tapi juga konsep yang dikenal sebagai “NASA-KOM.” NASAKOM merujuk pada kesatuan antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Kepentingan politik dan ideologis yang saling bersaing antara PKI, tentara, dan Soekarno merupakan struktur politik yang sangat tidak stabil di awal 1960-an.³

Era Orde Baru: Pancasila sebagai Asas Tunggal

Ken Ward dalam tulisannya menyebut bahwa pandangan Soeharto tentang Pancasila sangat dipengaruhi oleh kebatinan Jawa yang dia pelajari dari gurunya, penasihat spiritual pertama Soeharto, Daryatmo, yang adalah pakar al-Quran dan agama Jawa.

Soeharto menggambarkan pemerintahannya sebagai sebuah jalur tengah antara ekstrim komunisme dan Islam radikal. Salah satu hal yang menarik adalah ketika Soeharto berbicara dengan KNPI pada tahun 1982 mengenai

3 *Ibid.*

Pancasila sebagai satu-satunya dasar hukum bagi semua organisasi politik dan sosial. Soeharto tampaknya menjelaskan asal-usul kuno Pancasila, prinsip-prinsip pertama yang diperjuangkan oleh Soekarno yang terdiri dari keyakinan terhadap satu yang tertinggi, yaitu Allah, nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi melalui musyawarah perwakilan, dan keadilan sosial. Soeharto kemudian menekankan, karena orang Indonesia belum menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, satu-satunya fondasi bagi negara dan satu-satunya yang 'tepat' sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu solusinya adalah Pancasila menjadi satu-satunya ideologi atau dasar bagi semua organisasi politik dan sosial Indonesia, menggantikan semua ideologi lainnya. Pancasila menurut Soeharto, disebabkan oleh warisan kebijakan lama, filosofi Jawa Soeharto mengakui peran agama, agama apapun, karena agama juga mendesak manusia untuk mengendalikan gairah hidupnya. Orang-orang Indonesia kuno sangat toleran terhadap semua agama yang datang ke Indonesia, katanya, dan setiap orang bebas untuk memilih agama selera mereka. Tapi dia menambahkan bahwa satu peran yang tidak akan dimainkan Pancasila adalah ia menjadi sebuah agama. 'Saya telah berkali-kali mengatakan kepada para ulama Muslim yang takut bahwa Pancasila akan berkembang menjadi agama, itu tidak mungkin. Pancasila sebagai pandangan hidup, basis negara dan sebagai ideologi menjamin toleransi dan vitalitas semua

agama.' Sambil menyambut agama, Soeharto melanjutkan, orang Indonesia sebelumnya tidak meninggalkan budaya Indonesia. Keyakinan awal ini pada satu Tuhan tertinggi, dalam swadaya, dan sifat ganda dan sosial individu manusia telah menyebabkan kepercayaan pada prinsip-prinsip persatuan, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang telah tenggelam dari permukaan namun telah ditemukan kembali melalui artikulasi Soekarno, Pancasila.

Soeharto tampak puas untuk membangun warisan orang-orang Indonesia kuno yang tidak lebih dari sekadar bentuk deisme. Soeharto meringkas inti kebijaksanaan orang-orang Indonesia kuno sebagai tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soeharto mengakhiri ceramahnya dengan mengatakan bahwa dia tahu gagasan yang dia berikan akan sulit dipahami oleh orang non-Jawa. Apa yang telah dia garisbawahi, bagaimanapun, adalah warisan orang-orang Indonesia awal, entah itu orang Jawa atau tidak.⁴

Inisiatif Pancasila yang paling kontroversial adalah pemberlakuan undang-undang untuk memastikan bahwa semua organisasi berbasis massa di negeri ini menerima Pancasila sebagai dasar tunggal mereka. Dalam dua pidato, satu di Hari Kemerdekaan pada tahun 1982 dan yang lainnya pada bulan Juli 1983, Presiden Soeharto menyatakan alasan dan keinginan pemerintah untuk memastikan kesesuaian Pancasila. Dalam

4 Ken Ward, *Soeharto's Javanese Pancasila* dalam Monograf "Soeharto's New Order and its legacy" (ANU E Press, 2010)

pidato pertama Soeharto mengingatkan adanya ideologi alternatif, selain Pancasila, yang masih dipromosikan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajukan bahwa:

“semua kelompok sosial politik, terutama itu pihak politik yang berseberangan, agar menerima Pancasila sebagai *asas tunggal* mereka.”

Perbedaan pendapat terhadap undang-undang *asas tunggal* ini berasal dari sejumlah pihak, terutama organisasi-organisasi Islam dan para pemimpinnya.⁵

Michael Morfit mengulas bagaimana pola untuk memperkuat pemahaman Pancasila, dimana Presiden Soeharto membuat kursus indoktrinasi yang dikenal sebagai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), petunjuk untuk realisasi dan implementasi Pancasila. Dalam otobiografinya yang diterbitkan pada tahun 1989, Soeharto melaporkan dengan puas bahwa pada bulan Maret 1983 sekitar 1,8 juta pegawai negeri dan 150.000 personil militer yang telah mengikuti kursus P4 ini.

Dalam konteks P4, Pancasila merupakan filsafat tradisional bangsa Indonesia tentang kehidupan daripada pemaksaan doktrin yang asing (*alien*). Pancasila mengandung pengalaman masa lalu, refleksi masa kini, dan inspirasi masa depan. Khususnya sila pertama yang bertujuan untuk mengeluarkan ide negara Islam dan memasukkan kepercayaan tradisional mistik Jawa

yang melekat di jiwa Soeharto. Dengan demikian, Pancasila berhubungan erat dengan kelompok *abangan* atau tradisi sinkretis Jawa yang berseberangan dengan tradisi *santri* atau Islam yang lebih ortodoks.⁶

Penerapan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, yang dengannya Soeharto telah mengeluarkan begitu banyak *resources*, merupakan prestasi singkat tapi sekaligus bencana pada masa berikutnya. Hal itu akhirnya ditinggalkan pasca kejatuhan dirinya, di era reformasi tahun 1998. Kursus P4 juga berhenti. Kampanye Pancasila sebagai satu-satunya asas sebenarnya inisiatif Soeharto untuk mendestabilkan kekuatan politik Islam. Akibatnya, ini memperkuat perasaan sebagian umat Muslim yang merasa menjadi korban utama penindasan Soeharto, yang pada gilirannya menjadi bibit berkembangnya radikalisme Islam dan memberikan amunisi untuk bangkitnya kembali *Darul Islam* dan kemudian munculnya organisasi ekstrimis semacam Jemaah Islamiyah (JI) yang militan. Hal lainnya adalah glorifikasi Pancasila sebagai sistem kepercayaan pribumi yang superior juga telah menghambat kekuatan nasionalis sekuler untuk melakukan modernisasi ideologi mereka.

Pancasila Sebagai Dasar bagi Pendidikan Nasional

Shigio Nishimura dari Universitas

5 *Ibid.*

6 Michael Morfit, *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government* (1981); hlm. 337

Kyoto Jepang menyoroti Pancasila yang ditetapkan sebagai prinsip-prinsip nasional dalam pembukaan UUD 1945, pendidikan nasional setelah kemerdekaan menjadi bebas dari pendidikan kolonial dan mulai mengikuti prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip pendidikan ini, terdiri dari 10 item, yaitu terinspirasi oleh semangat Pancasila. Kemanusiaan dan nasionalisme (yang kedua dan ketiga prinsip) tercermin dalam penyediaan tujuan pendidikan, dan prinsip kesetaraan, kesempatan pendidikan didasarkan pada keadilan sosial (prinsip kelima). Juga, mencerminkan Prinsip pertama “kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa,” kebebasan beragama jelas dinyatakan dalam penyediaan pendidikan agama.

Pancasila dijadikan dasar pendidikan nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, sebagai “kesatuan yang terintegrasi dari nilai-nilai yang beragam “adalah” terlalu samar untuk memahami”, beberapa intelektual menyebut Pancasila “sebuah mangkuk tanpa zat” [Darmaputera 1988: 172]. Karena sifat ini, Pancasila telah ditafsirkan secara berbeda dengan berbagai ideologi setiap periode.

Di bawah rezim Soekarno, Pancasila sebagai tujuan pendidikan ditekankan sehubungan dengan sosialisme. Hal ini mencerminkan sikap rezim Soekarno ditandai dengan dominasi komunisme, meskipun mendamaikan tiga kekuatan nasionalisme, Islamisme dan komunisme. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah

“untuk melahirkan pembangun masyarakat sosialis yang mewujudkan semangat Pancasila.” Pada periode ini, pendidikan untuk sosialisme itu dianggap sebagai tujuan akhir pendidikan dengan nama Pancasila. Dengan pergantian rezim politik dari Soekarno ke Soeharto setelah kejadian 30 September tahun 1965, Pancasila ditafsirkan sehubungan dengan ideologi yang bertentangan dengan sosialisme.

Menurut Prinsip Umum Kebijakan Nasional yang dirumuskan pada tahun 1973 di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengambilan keputusan tertinggi di Indonesia, tujuan pendidikan adalah “membesarkan orang yang bisa mewujudkan ideal Pancasila.” Dasar ideologis rezim Soeharto dikatakan sebagai anti komunis dan memberikan penekanan pada pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam bukunya kebijakan pendidikan untuk komunisme dihapuskan. Dengan menekankan pembangunan ekonomi, tujuan pendidikan diubah untuk menumbuhkan atau “berorientasi pada pembangunan orang” (Pembangunan Manusia) yang dapat memberikan kontribusi untuk promosi dari rencana pembangunan nasional.

Ini menjadi jelas bahwa fungsi Pendidikan Moral Pancasila adalah sebagai pendorong bagi integrasi nasional melalui pendidikan sekolah. Peran Pancasila ini diperkuat dan dikonsolidasikan oleh pembentukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin bisa dikatakan bahwa Pendidikan Moral Pancasila melebihi dari segalanya yaitu “pendidikan untuk nasional-

isme.” Perkembangan menarik ini menyita perhatian bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kala itu.⁷

Hubungan Agama-Agama dalam Perspektif Pancasila

Dalam identitas agama yang kompleks di Indonesia, Pancasila tentu harus dilihat sebagai kompromi antara pilihan untuk negara Islami di satu sisi dan sekularisme di sisi lain. Salah satu peraturan paling ketat dari Indonesia modern adalah pelarangannya pada apa yang disebut SARA. Isu *suku, agama dan ras* (perbedaan antara kelompok-kelompok sosial dan etnis) dilarang sebagai topik di media dan dalam wacana sosial dan politik sehari-hari. Dengan banyaknya pulau, suku, bahasa dan budayanya, Indonesia ingin menciptakan negara yang modern dan stabil dengan memperkuat kohesi nasional. Satu aspek ideologi Pancasila adalah promosi persatuan nasional ini. Dalam hal ini Indonesia mungkin lebih dekat ke negara dan budaya dari Timur Jauh daripada ke jantung Islam dari Timur Tengah. Agama sipil nasional Pancasila telah dibandingkan dengan fungsi Shintoisme di Jepang dan Konfusianisme di China. Pancasila memberikan etika sosial dan politik, yang diajarkan di semua sekolah, dari sampai tahun pertama studi sarjana di tingkat universitas.

Usulan yang disebutkan sebelum-

nya tentang peran yang sebanding dari Pancasila di Indonesia dan pengajaran Konghucu di Cina tradisional tampaknya masuk akal, khususnya berkaitan dengan bidang etika. Konfusianisme memberikan standar perilaku untuk kehidupan sosial dan politik, sama seperti Pancasila di Indonesia.

Setelah kudeta tahun 1965 kaum Muslim menyambut gembira kebangkitan Pancasila sebagai jaminan kebebasan beragama dan sebagai mitra dalam perang melawan komunisme. Ketika di akhir 1970-an Pancasila menjadi lebih penting dan di 1980-an bahkan dipaksakan sebagai “satu-satunya dasar untuk semua organisasi sosial dan politik, “Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’ dan juga Dewan Gereja Nasional harus mengubah konstitusi mereka secara berurutan untuk memberikan Pancasila tempat yang paling menonjol. Akibatnya suara-suara kritis bermunculan mengeluhkan bahwa Islam atau Kristen kini diganti oleh agama sipil Pancasila.

Merujuk ke Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang asas tunggal untuk organisasi sosial dan politik, banyak organisasi keagamaan menyatakan keberatan dan penolakan mereka terhadap undang-undang ini. Pemerintah menyatakan bahwa undang-undang ini bukanlah dalam rangka penindasan agama oleh Pancasila. Ideologi dari Pancasila tidak akan ikut campur dalam teologi agama. Pemerintah dan para pemimpin agama akhirnya sampai pada sebuah konsensus mengenai ideologi dan agama, bahwa organisasi adalah hanya

7 Shigjo Nishimura, *The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia* (1995)

didasarkan pada Pancasila tapi teologi harus berbasis pada kitab suci. Jalan tengah yang dipromosikan adalah harmoni moderat antara sekularisme dan fanatisme ekstrim dalam agama.⁸

Kontestasi Tafsir Pancasila

Douglas Ramage dalam bukunya *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance* menelisik cara-cara di mana para pemimpin politik, militer, agama (terutama Islam), dan intelektual Indonesia di dalam memikirkan dan menggunakan ideologi negara untuk membahas isu-isu sensitif dan kontroversial pada tahun 1990an. Ia mengatakan Pancasila telah merampas hampir setiap aspek wacana politik bangsa. Pancasila melegitimasi tingkah laku politik bukan hanya pemerintah, tapi juga para kritikus rezim. Debat politik sering terjadi dalam kerangka Pancasila karena memang Pancasila membuka ruang lebar bagi seluruh perdebatan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Pancasila adalah mudah disesuaikan untuk berbagai tujuan dan dengan berbagai jenis aktor politik.

Studi ini berpendapat bahwa pertengkaran mengenai makna Pancasila sebagai gagasan negara yang dominan adalah bagian akut dari wacana politik kontemporer. Pancasila juga melakukan fungsi paling dasar dari pejabat manapun bahwa ideologi ini melegitimasi otoritas. Selain itu, di tahun 1990an, Pancasila juga dipakai oleh aktor non-

negara untuk melegitimasi tantangan kepada pemerintah.

Berlawanan dengan kecenderungan banyak analisis politik Indonesia untuk mengabaikan Pancasila, buku ini menunjukkan bahwa elit politik Indonesia menganggap Pancasila sebagai gagasan kunci dalam politik kontemporer. Dengan kata lain bahwa argumen elit mengenai sistem politik yang seharusnya dimiliki Indonesia adalah bagian dari wacana Pancasila. Argumen ini mencakup berbagai pertanyaan mengenai hubungan antara Islam dan pemerintah, peran angkatan bersenjata, persatuan nasional, suksesi presiden, demokratisasi, dan bahkan pembangunan ekonomi.

Ramage (1995) berargumen bahwa beberapa kritikus dari rezim baik dari luar maupun dari dalam pemerintah telah menggunakan Pancasila sebagai alat yang efektif untuk mempertanyakan kebijakan Soeharto dan isu-isu sensitif lainnya. Para pemimpin Muslim, nasionalis sekuler, dan bahkan anggota angkatan bersenjata mengkritik pemerintah Soeharto yang dianggap telah melanggar Pancasila, satu-satunya sumber legalitas legitimasi negara.

Pada tahun 1985 pemerintahan Presiden Soeharto mensyaratkan bahwa semua organisasi sosial, agama, dan politik harus mengadopsi Pancasila sebagai satu-satunya ideologis dan filosofis mereka. Organisasi yang menolak untuk mengadopsi Pancasila dalam peraturan mereka, konstitusi, atau asas dilarang oleh pemerintah. Hukum ini diadopsi setelah perdebatan

8 Karel Steenbrink, *Muslim-Christian Relations in the Pancasila State of Indonesia* (1998)

nasional dan polemik yang cukup panas. Banyak organisasi, terutama kelompok agama, takut bahwa mengadopsi Pancasila sebagai *asas tunggal* akan mengkompromikan integritas, independensi, dan bahkan organisasi mereka menggantikan *raison d'être* mereka dengan ideologi negara sekuler.

Soeharto berpendapat bahwa penerimaan tanpa syarat Pancasila sangat penting untuk terus menjaga stabilitas nasional dan kesatuan. Dia bahkan mengatakan itu meskipun Orde Baru telah berdasarkan Pancasila selama bertahun-tahun, akan tetapi masih ada elemen masyarakat yang masih enggan untuk menerima Pancasila. Soeharto mengemukakan bahwa orang dan kelompok yang menolak untuk menerima Pancasila sebagai “berbahaya”. Itu berarti bahwa pemerintah harus terus mempromosikan dan mengenalkan ideologi Pancasila. Selanjutnya, Soeharto menekankan peran militer/ABRI sebagai pembela *asas tunggal* Pancasila.

Sebagai organisasi sosial dan kebudayaan Islam terbesar, NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menekankan nasionalisme dan demokrasi, bukan Islam, sebagai saluran pilihan NU sebagai organisasi massa Islam.

Ini menunjukkan bagaimana ideologi negara - bukan Islam - melegitimasi suara NU untuk masuk kehidupan nasional. Dalam penjelasannya sendiri tentang penggunaan Pancasila dalam sebuah acara besar di NU, Gus Dur, menyatakan dia menganggap Pancasila

menjadi kendaraan terbaik untuk melegitimasi politik tindakan kepada organisasinya. Dia juga berpendapat bahwa mengekspresikan kesetiaan kepada Pancasila adalah cara yang paling efektif untuk menekankan kredensial nasionalis NU, khususnya dalam kontestasi dengan kegiatan ICMI. Wahid berpendapat bahwa dengan menyatakan pengabdian NU untuk Pancasila, ia menunjukkan komitmennya untuk negara demokratis sekuler. Ini menjadi legitimasi perilaku politik NU dan untuk menunjukkan komitmen terhadap visi negara sekuler yang demokratis. Dia mengimbau agar seorang Muslim Indonesia tegas berkomitmen untuk negara nasionalis sekuler berdasarkan Pancasila. Wahid menyerukan masyarakat demokratis yang diperlukan mengandung prasyarat kepatuhan terhadap Pancasila sebagai penjamin non-Islam dan non-militer yang diciptakan pemerintahan. Namun ia berpendapat bahwa imperatif politik jangka pendek Soeharto ini telah berkontribusi untuk kebangkitan berbahaya dari Politik Islam yang bisa melemahkan toleransi yang ditetapkan oleh Pancasila.

Bagi banyak intelektual dan aktivis politik Pancasila bukanlah isu utamanya. Namun, aspek yang paling penting adalah penerapan *asas tunggal* Pancasila. Bagi ICMI bahwa ideologi nasional tidak lagi dilihat sebagai lawan Islam. Ini merupakan perubahan dramatis dalam wacana kelompok Islam tentang Pancasila. Namun, keinginan beberapa

aktivis untuk menciptakan ‘masyarakat Islam,’ bukan negara Islam, dipandang oleh non muslim, Gus Dur, nasionalis sekuler, dan ABRI sebagai berpotensi tidak kompatibel dengan Pancasila.

Oleh karena itu, suara ICMI untuk membuat masyarakat Islam akan relevan dengan wacana nasional Pancasila, jika hanya sebagai acuan negatif. Aktivis ICMI berusaha untuk menciptakan masyarakat Islam di mana politik dan kebijakan pemerintah yang dijiwai dengan “nilai-nilai Islam.” Ini merupakan strategi politik untuk mengambil keuntungan dari Soeharto yang dirasakan perlu untuk legitimasi dari umat [Komunitas Islam]. Aktivis ICMI berusaha memposisikan diri lebih baik di dalam birokrasi dan pemerintah untuk mempromosikan secara efektif sebuah masyarakat yang lebih Islami.

Di kalangan militer, interpretasi militer tentang Pancasila sebagai ideologi “integralistik” di Indonesia yang mana peran politik ABRI dianggap sebuah seni yang tak terpisahkan dari kehidupan nasional. Pancasila bagi ABRI merupakan “ideologi integralistik” yang menolak kontrol sipil atas angkatan bersenjata negara, menolak demokrasi multipartai dan pandangan kompetitif sebagai melawan Pancasila. Bersama Presiden Soeharto, ABRI juga menggunakan Pancasila untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku politik yang dinilai tidak sesuai dengan interpretasi militer atas Pancasila.

Kaum nasionalis sekuler umumnya berpendapat bahwa mobilisasi politik dan demokratisasi seharusnya dilakukan dan tidak terikat pada afiliasi keagamaan. Nasionalis sekuler sering melihat Pancasila sebagai prasyarat demokrasi dan sebagai kompromi atas politik yang menjamin minoritas, dan hak-hak non-Muslim. Pandangan ini sangat dipegang oleh Abdurrahman Wahid. Sementara beberapa nasionalis sekuler khawatir bahwa pemerintah Islami yang mayoritas yang dipilih secara demokratis dapat membatasi hak-hak non-Muslim dan karenanya menjadi bertentangan dengan demokrasi, namun mereka mesti berhati-hati untuk tidak membesar-besarkan ketakutan tersebut. Oleh karena itu, dilema yang dihadapi oleh kaum nasionalis sekuler dan pendukung demokrasi kala itu adalah mereka berjuang untuk menavigasi antara angkatan bersenjata, Presiden Soeharto, dan kebangkitan politik Islam.

Orang-orang Indonesia yang dianggap sebagai “nasionalis sekuler” ini berbagi sejumlah gagasan luas tentang politik. Kebanyakan menganjurkan demokratisasi yang lebih besar dan berusaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tingkat paling umum nasionalis sekuler menganggap agama dan afiliasi “primordial” lainnya sebagai sarana yang kurang pantas untuk menyalurkan aspirasi politik. Nasionalis sekuler berpendapat bahwa semua warga negara Indonesia harus diperlakukan sama oleh

pemerintah. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa “ide sekularisme adalah ketidakberpihakan negara *vis-à-vis* warganya.” YB Mangunwijaya mengatakan jika Anda ingin membangun masyarakat sipil, maka Anda tidak bisa menyatukan negara dan agama. Ini harus didasarkan pada kesamaan kewarganegaraan, terlepas dari agama. Nasionalis sekuler berpendapat bahwa toleransi beragama dan kesetaraan kewarganegaraan terkait erat dengan pelestarian persatuan nasional Indonesia. Pancasila menarik secara konstruktif semua warga negara Indonesia untuk membangun sebuah negara berdasarkan nilai kemanusiaan seperti toleransi etnik, agama, dan regional, dan keadilan sosial. Ini adalah Pancasila pada tingkat “niat.” Pancasila memang dimaksudkan sebagai rumusan representasi “gagasan” negara Indonesia.⁹

Kesimpulan

Para peneliti asing yang dibahas di atas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah untuk menyeimbangkan berbagai kekuatan politik yang ada di dalam sejarah Indonesia. Namun dalam perjalanannya, penafsiran Pancasila sangat dipengaruhi oleh corak politik masing-masing rezim yang berkuasa. Pancasila dapat menjadi ideologi yang liberatif dimana menjamin seluruh hak-hak warga negara secara setara, tanpa membedakan suku, ras dan agama, namun pada saat yang

sama Pancasila dapat dipakai sebagai ideologi yang represif (seperti pada era Soeharto) untuk menghabisasi lawan-lawan politiknya.

Bagaimana Pancasila diterjemahkan pada zaman sekarang di mana ideologi fundamentalisme semakin meningkat? Inilah tantangan bangsa Indonesia ke depan, mengutip kata-kata peneliti muda dari Australia (JB) keindahan Pancasila adalah bahwa hal itu terbuka untuk interpretasi yang luas dan dengan demikian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dan salah satu tujuan tersebut adalah de-radikalisasi dan menawarkan narasi alternatif bagi masyarakat dan untuk individu agar tidak terjebak dalam siklus ekstremisme agama. Saat ini simbologi Pancasila atau Pancasila juga sering digunakan secara negatif oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyebabkan perpecahan di masyarakat, misalnya melalui isu kebangkitan PKI. *Wallahu a'lam.*

9 *Ibid.*, Douglas Ramage, *Politics in Indonesia*.....